

Dr. Ridwan, S.E., M.Si.
H. Nasar Baso, S.H., M.Si.

PERENCANAAN PIMBANGUNAN DAERAH



Dr. Ridwan, S.E., M.Si.
H. Nasar Baso, S.H., M.Si.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung

Per01 (vi + 238) 16 x 24 cm

Judul Buku : Perencanaan Pembangunan Daerah

Penulis : Dr. Ridwan, S.E., M.Si.
H. Nashar, S.H., M.Si.

Layout : Sandi F.

Penerbit : **ALFABETA** cv

Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung

Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373

Website: www.cvalfabeta.com

Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu : Oktober 2017

ISBN : 978-602-289-319-6

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena segala apa yang kita lakukan hanyalah dengan Rahmat dan ridhonya Proposal penyusunan buku Literatur ini dapat dirampungkan. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan yang telah diprogramkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), semoga dengan kegiatan ini dapat memotivasi para Dosen IPDN agar bisa berkreasi dalam rangka penyusunan buku literatur. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh Praja Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) khususnya maupun bagi mahasiswa pada umumnya. Harapan saya program semacam ini dapat dipertahankan bahkan dikembangkan untuk memberikan ruang kepada para dosen IPDN dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Dengan demikian ke depan akan dapat menambah Buku Literatur untuk dipergunakan baik bagi Praja IPDN maupun untuk pegangan bagi dosen pengampu mata Kuliah Perencanaan Pembangunan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon kehadirat Allah SWT sehingga kegiatan ini dinilai sebagai amal ibadah. Amin

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
ARTI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN	1
A. Apa yang Dimaksud dengan Perencanaan	1
B. Masalah dalam Perencanaan Pembangunan	6
C. Urutan Langkah-langkah dalam Perencanaan Wilayah	17
D. Mengapa Perencanaan Daerah Diperlukan	19
E. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Daerah	21
F. Bidang-bidang yang Tercakup dalam Perencanaan Daerah	23
G. Jenis-jenis Perencanaan Wilayah.....	26
H. Tingkat-tingkat Perencanaan Wilayah.....	33
BAB II	
PERENCANAAN EKONOMI	38
A. Pengertian Perencanaan Ekonomi	38
B. Kebutuhan Perencanaan di Negara Terbelakang	40
C. Perumusan Rencana dan Syarat-syarat Perencanaan yang Berhasil	43
BAB III	
TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI	86
A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Regional	86
B. Teori Lokasi dan Aglomerasi	98
C. Teori Tempat Sentral	106
D. Teori Kutub Pertumbuhan	110
E. Teori Pembangunan Polarisasi	118

BAB IV

BENTUK DAN STRUKTUR INTERNAL KOTA	124
A. Unsur Pembentuk Struktur Tata Ruang Kota	125
B. Struktur Tata Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang Kota	135

BAB V

PERENCANAAN KOTA, METROPOLITAN, DAN KAWASAN URBANISASI SERTA PERTUMBUHAN KOTA ..	140
A. Urbanisasi	140
B. Pertumbuhan Perkotaan	142
C. Paradigma Aglomerasi Industri	149
D. Kebijakan Urbanisasi di Indonesia	153

BAB VI

PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH.....	165
A. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah	165
B. Pendekatan Sektoral	167
C. Pendekatan Regional	170

BAB VII

STRUKTUR RUANG DAN PERWILAYAHAN	176
A. Definisi Ruang	176
B. Ruang Sebagai Wilayah	177
C. Pengertian Wilayah untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	180
D. Jenis-jenis Perwilayahan	182
E. Kebaikan dan Keburukan Masing-masing Jenis Perwilayahan	184

BAB VIII

KOTA DAN DAERAH BELAKANG	189
A. Sejarah Terbentuknya Kota-kota di Indonesia	189
B. Pendekatan Perencanaan Kota	190
C. Beberapa Pendekatan Perencanaan Kota	213
D. Tantangan Masa Depan Perkotaan	218

E. Paradigma Baru dalam Perencanaan Kota	222
F. Perubahan Peran Perencana Kota	229
DAFTAR PUSTAKA	231
TENTANG PENULIS	236

BAB I

ARTI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN

A. Apa yang Dimaksud dengan Perencanaan

Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah "perencanaan ekonomi". Di dalam kepustakaan ekonomi istilah tersebut dipergunakan sangat lentur. Ia sering dikelirukan dengan komunisme, sosialisme atau pembangunan ekonomi. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatu rencana. Lalu apakah perencanaan itu? Perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, atau militer. Karena itu, "persoalannya bukan antara rencana dan tidak ada rencana, tetapi persoalannya adalah antara berbagai macam rencana."

Prof. Lewis menunjukkan pengertian perencanaan yang dipakai di dalam perpustakaan ekonomi. "*Pertama*, banyak sekali kepustakaan yang hanya menghubungkan istilah itu dengan penentuan letak geografis faktor, bangunan tempat tinggal, bioskop dan semacamnya. Kadang kala ia disebut perencanaan kota dan Negara, dan kadangkala disebut perencanaan saja. *Kedua*, 'perencanaan' hanya berarti memutuskan uang apa yang akan dipergunakan pemerintah di masa depan, seandainya ia mempunyai uang yang dapat dibelanjakan. *Ketiga*,

BAB II

PERENCANAAN EKONOMI

A. Pengertian Perencanaan Ekonomi

Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah "perencanaan ekonomi". Di dalam kepustakaan ekonomi istilah tersebut dipergunakan sangat lentur. Ia sering dikelirukan dengan komunisme, sosialisme atau pembangunan ekonomi. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatu rencana. Lalu apakah perencanaan itu? Perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau militer. Karena itu, "persoalannya bukan antara rencana dan tidak ada rencana, tetapi persoalannya adalah antara berbagai macam rencana."

Prof. Lewis menunjukkan pengertian perencanaan yang dipakai di dalam perpustakaan ekonomi. "*Pertama*, banyak sekali kepustakaan yang hanya menghubungkan istilah itu dengan penentuan letak geografis faktor, bangunan tempat tinggal, bioskop dan semacamnya. Kadang kala ia disebut perencanaan kota dan Negara, dan kadangkala disebut perencanaan saja. *Kedua*, 'perencanaan' hanya berarti memutuskan uang apa yang akan dipergunakan pemerintah di masa depan, seandainya ia mempunyai uang yang dapat dibelanjakan. *Ketiga*, 'ekonomi berencana' adalah ekonomi dimana masing-masing satuan

BAB III

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Regional

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat merupakan kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan makin majunya studi-studi pembangunan ekonomi, banyak teori telah di introduksikan. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah regional) secara komprehensif.

Dalam pembangunan ekonomi wilayah (*regional*) dapat dikemukakan beberapa teori yang penting, yakni (i) pemikiran-pemikiran menurut beberapa aliran dalam Ilmu Ekonomi (misalnya: Klasik, Neo Klasik, Harrod-Domar, Keynes dan Pasca Keynes), teori

BAB V

PERENCANAAN KOTA, METROPOLITAN DAN KAWASAN URBANISASI SERTA PERTUMBUHAN KOTA

A. Urbanisasi

Semakin lama penduduk dunia semakin banyak yang tinggal di kota. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hampir separuh penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Laporan ini juga menyajikan proyeksi yang menarik. *Pertama*, begitu melewati milenium baru, penduduk perkotaan akan melampaui jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia. *Kedua* pada tahun 2030-an dari penduduk dunia diperkirakan akan tinggal di wilayah perkotaan, baik kota kecil, kota besar, maupun kota metropolitan. Beberapa pakar sependapat bahwa dasawarsa terakhir abad ke-20 akan menjadi saksi apakah penduduk perkotaan melebihi penduduk perdesaan untuk pertama kalinya dalam sejarah (Clark, 1996). Walaupun fenomena ini amat monumental, kejadian historis ini relatif kurang mendapat perhatian.

Dalam konteks proses urbanisasi pada skala global, munculnya beberapa kota mega *aglomerasi* perkotaan menarik untuk dicatat. Dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, kota mega telah bermunculan di kawasan Asia selama lima dasawarsa terakhir. Pada tahun 1950, hanya New York dan Tokyo yang mencapai jumlah penduduk sebesar itu, dan terus berlanjut hingga akhir dekade 1960-an. Pada tahun 1970, Tokyo menjadi kota terbesar di dunia dan diperkirakan tetap mempertahankan

BAB VI

PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas biasanya tertuang dalam rencana pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah. Visi adalah cita-cita tentang masa depan wilayah yang diinginkan. Visi seringkali bersifat abstrak tetapi ingin menciptakan ciri khas wilayah yang ideal sehingga berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misi adalah kondisi antara atau suatu tahapan untuk mencapai visi tersebut. Misi adalah kondisi ideal yang setingkat dibawah visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya. Dalam kondisi ideal, perencanaan wilayah sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Akan tetapi dalam prakteknya, cukup banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, tetapi berdasarkan undang-undang harus menyusun rencana pembangunan wilayahnya karena terkait dengan penyusunan anggaran. Seandainya tata ruang itu adalah ada dan masih

BAB VII

STRUKTUR RUANG DAN PERWILAYAHAN

A. Definisi Ruang

Apabila kita menyebut kata ruang, apa sebetulnya yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkret dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu memiliki batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi bisa juga sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda/kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda/kegiatan. Dalam hal ini kata "tempat" adalah berdimensi tiga dan kata benda/kegiatan berarti benda/kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri/karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda ataupun kegiatan sebagai tempat menerima tamu, dan lain-lain. Tanpa ruang maka suatu benda/kegiatan tidak mungkin berada di sana. Dalam bahasa Inggris, padanan kata ruang adalah *space*. Menurut kamus Webster, *space* dapat diartikan dengan berbagai cara, namun di sini dikutip 2 cara:

BAB VIII

KOTA DAN DAERAH BELAKANG

A. Sejarah Terbentuknya Kota-kota di Indonesia

Pengertian mengenai kota (*city*) yang kemudian lebih sering dijadikan acuan di Indonesia adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Dengan ungkapan yang berbeda, definisi kota yang lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional ekonomis, dan individualistis (Ditjen Cipta Karya: 1997).

Secara khusus, terhadap pengertian dan karakteristik kota akan dilakukan pembahasan tersendiri yang lebih lengkap dengan meninjaunya dari berbagai aspek: fisik, sosial, dan ekonomi.

Selain pengertian kota, dikenal pula perkotaan (*urban*) yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/karakteristik/sifat kekotaan. Dalam hal ini perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya/kawasan suburban. UU No.24/1992 mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

DAFTAR PUSTAKA

- Asmita Raharjo, 2007, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*.
- Agui, M., dan Henderson, J.V., 2005, "Why Country are Fiscally Decentralizing", *Journal of Public Economics*, Vol.89, 2005, 1.157-1.189.
- ..., I.J., 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LP FE UI.
- ..., 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, BPEF.
- ..., Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth Edition, Praeger Publishers, New York
- ..., E.J., 1994, *Planning Local Economic Development; Theory and Practice*, Second edition, Sage Publication.
- ..., J.P., dan Cornia, G.C., "Fiscal Decentralization in Economic Transformation: The Czech and Slovak", *Europe-Asia Studies*, Vol. 52, No.3, 2000, 507-522.
- ..., K.E., and Fair, R.C., 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Edisi 8, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- ..., D., and Hills, P., 1994, *An Introduction to Development Planning in the Third World*, John Wiley & Sons Ltd,
- ..., James A. Dan David P. Levine, 1992, *Theories of Political Economy*, 1, Cambridge University Press, USA.
- ..., Rajesh. 1992. *Industrialization and Development in The Third World*. Chapman and Hall, New York
- ..., Andrianof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan; Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES. Jakarta
- ..., 2002. *Sosiologi Ekonomi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- ..., H., and Zou, H., "Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross-Country Study", *Journal of Urban Economics*, Vol. 43, 1998, 244-257.